

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Amirudin, & Z. A. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. (2024). *Kabupaten Buleleng Dalam Rangka Buleleng Regency In Figures 2024*. Buleleng: BPS Kabupaten Buleleng.
- Badan Statistik Kabupaten Buleleng. (2024). *Kecamatan Sukasada Dalam Rangka Sukasada District in Figures 2024*. Buleleng: BPS Kabupaten Buleleng.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- Fassa, F., & Asmiyanti. (2024). *Penyelesaian Sengketa Kontruksi: Das Sollen & Das Sein*. Jakarta: Podomoro University Press.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., & dkk. (2024). *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2024). *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2022). *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Rahmawati, N. N. (2015). Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu). *Studi Kultural*.
- Rahmawati, N. N. (2021). Budaya Bali dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Prespektif Hukum Waris Hindu). *Satya Dharma*, 2.
- Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Satria, I. K., & Pradnyan, N. P. (2021). Brata Penyanggra Ratu Wayan dan Ratu Ketut di Desa Adat Kendisan Kecamatan Kitamani Kabupaten Bangi. *Widyanatya*.
- Siregar, N. F. (2018). Efektifitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat*.
- Soekanto, S. (2020). *Hukum Adat Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Sukerti, N. N. (2020). *Kedudukan Perempuan Dalam Prespektif Hukum Waris Bali*. Bali: Indonesia Prime.
- Supir, I. K. (2024). *Keberlangsungan dan Perubahan Seni Prasi di Bali*. Badung : Nilacakra
- Utama, I. G., Sumanrtana, I. M., & Waruwu, D. (2021). *Bali Membangun Bali*. Denpasar: Badan Riset dan Inovasi Provinsi Bali.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2016). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Swasta Nulus & Bali Shanti.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.
- Zami, S. Z. (2019). Keberlakuan Hukum Waris Adat Bali di Karangasem Bali dengan Hukum Waris Adat Bali Pada Suku Tengger. *Dinamika*.

Artikel dalam Jurnal

- Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria. *Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Adnyani, N. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 6, No. 2*.

- Bangun, E. (2017). Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata. *Lex et Societatis, Vol. V/No. 1*.
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 3, No. 6*.
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris, Vol 3*.
- Hakimah, N. (2023). Sistem Kewarisan Perdata Barat dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Prespektif BW dan KHI). *Jurnal Rectum, 132*.
- Hemamalini, K., & Suhardi, U. (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu. *Dharmasmrti Vol. XIII, No. 26 Oktober 2015, 37 - 39*.
- Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Listyawati, P. R., & Dazriani, W. (2015). Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata. *Jurnal Pembaharuan Hukum, Volumen II*.
- Manik Wedanti, I. A. (2022). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali Pasca Keputusan MDP Bali Tahun 2010 (Studi Kasus di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali). *Vyavahara Duta, Volume XVII, No. 1*.
- Nandari, N. S., Prasada, D. K., & Anastasya, P. S. (2022). Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Keputusan Persamuan Agung III MUDP 2010 Di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. *Universitas Pendidikan Nasional*.
- Orlando, G. (2022). Efektifitas HUKUM dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. VI*.
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Prespektif Legal System Lawrence M. Freidman. *Jurnal El - Desturie, Vol 1*.
- Parwati, N. E. (2021). Hak dan Status Perempuan Hamil Luar Kawin dengan Pria Beristri dalam Adat Larangan Poligami Prespektif HAM. *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.

- Pratiwi, N. I., Subdiya, D. G., & Karma, N. S. (2021). Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Persamuan Agung III Majelis Utama Desa Prakaman Bali (Nomor 01/KEP/PSM - 3/MDP Bali/X/2010). *Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, No.1*.
- Sudiatmaka, K. (2016). Realisasi Isi Keputusan Persamuan Agung III MUDP Bali No. 01/KEP/PSM-3 BALI/X/2010 Terkait Dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewaris (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Suryanata, I. F. (2021). Hukum Waris Adat Dalam Pandangan Kesetaraan Gender . *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu, Volume 11, No.2*.
- Warsana, I. M. (2021). Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Prakaman Bali Nomor 01/KEP/PSM - 3/MDP BALI/X/2010 Tentang Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Wirawan, I. K. (2017). Penerimaan Masyarakat Hukum Adat atas Keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Prakaman Bali Nomor 01/KEP/PSM - 3/MDP BALI/X/2010, Tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hak Waris Perempuan (Studi Empiris di Kabupaten Karangasem, Tabanan, dan Buleleng). *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana*.
- Yanti, G. A., Budiarta, I. P., & dkk. (2021). Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Prakaman Bali (MUDP) Bali No.01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Lambing. *Jurnal Interpretasi Hukum, 37*.

Artikel Elektronik

- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri*. Retrieved Agustus 29, 2024, from Data Potensi Jumlah Penduduk Per Provinsi: <https://e-prodeskel.kemendagri.go.id/v/2024/data-integrasi/13/data-potensi-jumlah-penduduk>
- Indonesia, D. J. (2024). *Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri*. Retrieved Agustus 29, 2024, from Data Potensi Jumlah Penduduk Per Provinsi: <https://e-prodeskel.kemendagri.go.id/v/2024/data-integrasi/13/data-potensi-jumlah-penduduk>
- Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. (2022, Juli 25). *Sekilas Tentang Kantah Buleleng*. Retrieved Januari 2, 2025, from Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng: <https://bpbuleleng.id/profil-kantah>

SDGs, L. (2021, Juli 31). *Profil Daerah*. Retrieved Januari 1, 2025, from Localise SDGs: <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/15>

Skripsi

Sugra Sandy, Ida Ayu. 2019. *Sistem Pewarisan di Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dalam Prespektif Keputusan Pesamuan Agung MUDP Bali No. 01/KEP/PSM – 3/MDP Bali/X/2010*. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha: Singaraja

Suryaningrat, Komang Dewi. 2023. *Implementasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM – 3/MDP BALI/X/2010 Terhadap Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng*. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha: Singaraja.

Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia. 1945. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen. Jakarta.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat perubaha atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Prakaman. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Prakaman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM – 3/MDP BALI/X/2010.

Keputusan Pasamuan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023.